BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan analisa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja Pemerintah Daerah Kota Padang berdasarkan rasio derajat desentralisasi menunjukkan bahwa rata-rata rasio selama 5 tahun terakhir sebesar 19,36%, yang berarti masih dikategorikan rendah.
2. Rasio ketergantungan keuangan daerah dengan rata-rata sebesar 79,49%, dapat dikategorikan tingkat ketergantungannya masih tinggi karena masih diatas 50%.
3. Rasio kemandirian keuangan daerah Kota Padang, dari rata-rata yang didapatkan sebesar 24,17% secara keseluruhan dapat dikatakan masih rendah. Dengan kata lain pemerintah daerah masih bergantung dengan dana dari pemerintah pusat dalam menjalankan kegiatan daerah.
4. Rasio efektivitas pendapatan asli daerah Kota Padang, dilihat dari rata-rata selama 5 tahun terakhir sebesar 92,11% dapat dikategorikan efektif.
5. Rasio efisiensi keuangan daerah Kota Padang, menunjukkan bahwa rata-rata rasio efisiensinya masih dikategorikan kurang efisien. Karena rata-rata rasionya sebesar 99,75% berada diantara 90% sampai 100%.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

6. Rasio keserasian pemerintah daerah Kota Padang dalam menggunakan dananya masih belum berimbang, karena sebagian besar APBD masih digunakan untuk belanja operasi, yakni rata-rata belanja operasi sebesar 82,72%. Di lain pihak rasio belanja modal terhadap APBD juga masih rendah yaitu sebesar 17,23%. Rasio keserasiannya lebih didominasi oleh belanja operasi.
7. Rasio pertumbuhan Kota Padang, menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan belanja lebih besar dibandingkan dengan rasio pertumbuhan pendapatan. Dimana rata-rata rasio pertumbuhan pendapatan sebesar 6,83% dan rasio pertumbuhan belanja sebesar 10,11%.
8. Rasio DSCR Kota Padang, menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Padang mempunyai kemampuan untuk melakukan pembayaran kembali pinjaman daerah. Karena rata-rata rasio DSCR berada diatas 2,5 setiap tahun.

Secara keseluruhan kinerja Kota Padang yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan daerah untuk tahun 2013 sampai tahun 2017 mengalami penurunan, hal ini terjadi dikarenakan tidak tercapainya target atas penerimaan pendapatan daerah Pemerintah Daerah Kota Padang. Selain itu juga besarnya dana bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Padang, dan juga besarnya jumlah belanja daerah. Bahkan belanja daerah lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang diterima oleh daerah tersebut. Hal ini tidak baik bagi kinerja pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah Kota Padang tidak mampu dalam meningkatkan pendapatan daerah untuk membiayai belanja-belanja daerah.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, saran yang dapat sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Padang diharapkan berupaya untuk lebih meningkatkan sumber-sumber PAD dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan memperluas sektor-sektor yang berpotensi menambah PAD, sehingga ketergantungan dan kemandirian keuangan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi semakin bisa dikurangi.
2. Pemerintah Kota Padang agar lebih bijak dalam mengalokasikan belanjanya, yakni mengurangi belanja operasi dan meningkatkan belanja modal. Sehingga pertumbuhan belanjanya bisa dikurangi dan pertumbuhan pendapatannya bisa ditingkatkan.
3. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya bisa mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah, dengan menggunakan rasio yang menilai kinerja keuangan pemerintah daerah dari segi laporan posisi keuangan/neraca pemerintah daerah serta menambah teknik pengumpulan data untuk mengetahui penyebab terjadinya suatu kenaikan dan penurunan terhadap pendapatan atau belanja daerah.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA